

Fenomena *Local Bossism* Dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak Solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

Nurul Rahma^{1*}, Ibrahim², Ranto³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

Email : ^{1*}nurulrahma.zonetcell@gmail.com, ²iim_babel@yahoo.com, ³rantopalempat@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak—Fenomena bos lokal sebagian besar selalu berkaitan dengan politik elektoral. Padahal apabila membahas mengenai permasalahan bossisme lokal atau bos lokal ini sering dijumpai pada masalah-masalah yang sering dianggap kecil dan sepele padahal memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat, yang dimana local bossism ini merupakan kajian politik amat sangat rumit dan bervariasi adanya, seperti pada permasalahan distribusi bahan bakar minyak solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena *local bossism* dalam distribusi bahan bakar minyak solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan konsep *Local Bossism* oleh John Thayer Sidel sebagai teori utama dalam penelitian dan konsep Rent Seeking oleh Gurdon Tullock dan Anne Kruger sebagai teori tambahannya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sumber data primernya berasal dari wawancara yang tidak terstruktur dengan mewawancarai bos lokal, nelayan, dan pegawai (*state apparatus*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran local bossism dalam distribusi bahan bakar minyak solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat menjadi suatu produk yang dihasilkan dari konspirasi dan kolusi aparatus negara dengan bos lokal, yang muncul dari adanya kekuasaan yang dimiliki aparatus negara dan “wibawa sosial” yang ada pada bos lokal di masyarakat yang dikendalikan itulah yang menyebabkan para *bosses* atau bossism muncul dan terus tumbuh sebagai kekuatan politik lokal. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena *local bossism* ini ialah (1) kuatnya posisi bos lokal, (2) perlindungan dari aparatus negara dan aparat negara, serta (3) ketergantungan masyarakat terhadap bos lokal.

Kata Kunci: Bos Lokal, Pemburu Rente, Nelayan, Bahan Bakar Solar

Abstract—*The phenomenon of local bosses is mostly related to electoral politics. Even though when discussing the problem of local bossism or local bosses, it is often found on issues that are often considered small and trivial even though they have a very large impact on society, where this local bossism is a very complicated and varied political study, such as the problems distribution of diesel fuel at the Nusantara Fishing Port of Sungailiat. The purpose of this research is to analyze the phenomenon of local bossism in the distribution of diesel fuel at the Nusantara Fishing Port of Sungailiat and to identify the factors behind it. This study uses the concept of Local Bossism by John Thayer Sidel as the main theory in research and the concept of Rent Seeking by Gurdon Tullock and Anne Kruger as an additional theory. The method used in this research is descriptive qualitative, the primary data source comes from unstructured interviews by interviewing local bosses, fishermen, and employees (state apparatus). The results of this study indicate that the presence of local bossism in the distribution of diesel fuel at the Nusantara Fishing Port of Sungailiat is a product resulting from the conspiracy and collusion of the state apparatus with local bosses. What arises from the existence of power possessed by the state apparatus and the "social authority" that exists in local bosses in controlled communities is what causes bosses or bossism to emerge and continue to grow as local political forces. The factors behind the phenomenon of local bossism are (1) the strong position of local bosses, (2) protection from state apparatus and state apparatus, and (3) community dependence on local bosses.*

Keywords: Local Boss, Rent Seeker, Fishermen, Diesel Fuel

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, terdiri dari 17.504 pulau dengan luas laut tiga kali dari luas daratannya. Panjang garis pantai Indonesia yaitu 81.000 km lebih dan luas lautnya 2,7 juta km² atau sama dengan 70% dari luas negara Indonesia itu sendiri (Dahuri, 2000). Tidak heran jika daerah pesisir serta lautan Indonesia dikenal dengan kekayaan dan juga keanekaragaman laut terbesar yang ada di dunia serta kaya akan sumber daya alam terutama dalam sumber daya kelautan. Sumber daya hayati dari laut yang Indonesia sangat kaya sehingga dapat menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumber daya atau *resources based economy*. Sumber daya laut memberikan peluang bagi masyarakat pesisir dimanfaatkan sebagai

sumber mata pencaharian sebagai nelayan, tidak heran apabila pekerjaan sebagai seorang nelayan merupakan pekerjaan yang banyak sekali di lakukan masyarakat di wilayah pesisir. Agar terciptanya nelayan yang unggul serta berkompeten menjadi penggerak ekonomi negara Indonesia, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk para nelayan dengan membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bentuk pendampingan terhadap nelayan (Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan). Salah satu bentuk pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu membawahi pelabuhan perikanan di Indonesia. Pelabuhan perikanan perannya sangat penting dalam aktivitas para nelayan, alasannya tentu karena pelabuhan perikanan menjadi *center* perekonomian seluruh kegiatan atau aktivitas para nelayan. Salah satu golongan pelabuhan yang menjadi tempat penelitian yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara atau dikenal dengan singkatan PPN.

PPN Sungailiat terletak di kota Sungailiat terletak jalan Yos Sudarso nomor 50 di Kecamatan Sungailiat yang dimana Sungailiat sebagai ibukota dari Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus menjadi pusat dari sektor perikanan yang ada di Kabupaten Bangka dengan luas kawasan PPN Sungailiat mencapai 44,91 Ha dengan letak geografis 01° 51' 56" LS dan 106° 07' 20" BT. (Profil Pelabuhan Perikan Nusantara Sungailiat). Salah satu pendukung berjalan lancarnya kegiatan yang ada di PPN Sungailiat tentu sangat membutuhkan fasilitas. Fasilitas dimuat dalam PERMEN KP No.08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan yang menjelaskan terkait fasilitas pelabuhan perikanan terdiri dari tiga fasilitas, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Salah satu fasilitas yang tentunya sangat penting dalam berjalannya pengoperasian kapal nelayan yaitu fasilitas fungsional, fasilitas fungsional ini salah satunya terdiri dari penyediaan atau instalasi bahan bakar minyak solar. Bahan bakar minyak solar termasuk komponen penting penunjang berjalannya aktivitas para nelayan yang ada di PPN Sungailiat (Andrias, 2021). Bahan bakar minyak solar memiliki peranan yang sangat penting untuk peningkatan produktivitas perikanan. Dilihat dari input energi bahan bakar minyak solar langsung mencapai 75% dari total input energi bahan bakar minyak solar pada aktivitas penangkapan ikan hal ini tentunya sangat memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan nelayan. (Luhur dan Sari, 2012; Tyedmers, 2004; Pujiyani, 2009; Satria, 2009)

Bentuk kepedulian pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendistribusian bahan bakar minyak solar di PPN untuk pemberian subsidi bahan bakar minyak solar dalam sektor perikanan disebut dengan sebutan Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). Kebijakan memiliki tujuan membantu para nelayan membeli bahan bakar minyak solar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebijakan ini dimuat dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang petunjuk pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak untuk usaha Perikanan Tangkap. Adanya kebijakan ini ditindak lanjuti oleh PPN Sungailiat dengan mengadakan rapat dengan menyimak dan memperhatikan arahan dari kepala PPN Sungailiat dengan membahas mengenai koordinasi serta menghimpun masukan terkait pelaksanaan pemberian rekomendasi bahan bakar minyak solar mekanisme pemberian rekomendasi bahan bakar minyak solar dan kuota bahan bakar minyak solar serta jumlah kapal di PPN Sungailiat. Keberadaan bahan bakar minyak solar sangat penting dalam aktivitas pelayaran nelayan. Sehingga untuk menjamin ketersediaannya, kepastian ini diperlukan karena menyangkut dampak subsisten dari nelayan yang menggantungkan penghidupannya, penangkapan ikan, dan ketersediaan ikan yang dikonsumsi masyarakat di pasar juga terpengaruh secara langsung. Selain itu, ketersediaan solar dapat dengan mudah disalahgunakan, baik di tingkat nelayan maupun oleh pihak lain yang menjadi pemasoknya.

Usulan kebijakan subsidi bahan bakar minyak solar PPN Sungailiat masih berjalan tahun ini. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya permasalahan pendistribusian bahan bakar minyak solar di PPN Sungailiat, seperti belum ada kebijakan antisipatif yang efektif mengurangi dampak kebijakan, mulai dari suplai bahan bakar minyak solar nelayan sering tiba-tiba kehabisan stok, tapi bagi bos-bos atau pemilik kapal selalu mendapatkan suplai solar yang diinginkan. Pertanyaannya, apakah model distribusi yang diterapkan pemerintah selama ini sudah berjalan dengan baik atau justru memberi ruang bagi munculnya bosisme lokal yang diistimewakan dalam alokasi solar oleh PPN Sungailiat. Itulah sejumlah pertanyaan yang distudi lebih mendalam dalam penelitian ini. Perlu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa faktor yang melatarbelakangi praktik local bossism yang terjadi dalam distribusi bahan bakar minyak solar di

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Yang membuat kajian ini amat sangat menarik untuk dibahas pula yaitu, apabila berbicara mengenai bos lokal sebagian besar selalu berkaitan dengan politik elektoral. Padahal apabila membahas mengenai permasalahan bosisme lokal atau bos lokal ini sering dijumpai pada masalah-masalah yang sering dianggap kecil dan sepele padahal memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat, yang dimana local bossism ini merupakan kajian politik amat sangat rumit dan bervariasi adanya, seperti pada permasalahan distribusi bahan bakar minyak solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat ini.

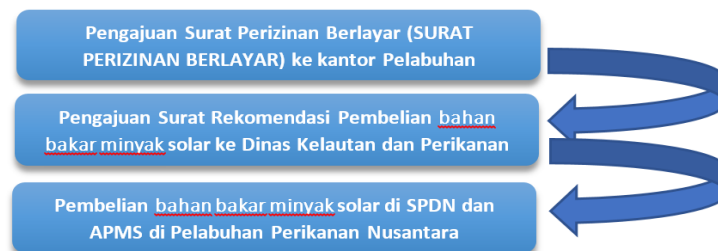
2. METODE

Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dianggap sangat relevan dalam kajian permasalahan sosial politik yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data jenis penelitian kualitatif ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap data *reduction* (reduksi data), data display (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan atau verifikasi). Informan yang menjadi objek penelitian adalah 9 orang, terdiri dari 3 bos lokal, 3 nelayan, 1 istri nelayan, dan 2 pengurus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fenomena Local Bossism Dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak Solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

Dalam distribusi bahan bakar minyak solar yang ada di PPN Sungailiat, pemberian rekomendasi bahan bakar minyak solar akan dilakukan evaluasi setiap bulannya. Dengan adanya kebijakan tersebut yang telah berjalan beberapa tahun belakangan, tentunya diharapkan berjalan sesuai dengan prosedur dan memberi manfaat yang berdampak baik untuk para nelayan yang ada serta yang menggunakan PPN Sungailiat sebagai fasilitas dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang diharapkan memberikan kemudahan pada proses pembelian bahan bakar minyak solar untuk para nelayan di PPN Sungailiat malah menjadi peluang munculnya fenomena local bossism dan menjadi ladang bisnis bagi bos-bos lokal serta pemerintah yang berkaitan dengan proses distribusi bahan bakar minyak solar tersebut.



Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar di PPN Sungailiat

Fenomena *local bossism* ini menjadikan bos-bos lokal yang ada memiliki peran sebagai *predatory broker politics* yang ada di dalam daerah teritorial tertentu yang dalam hal ini yaitu PPN Sungailiat (Wicaksono, 2021). Bos lokal memiliki monopoli kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam pendistribusian solar yang ada di PPN. Seperti apa yang dijelaskan Sidel bahwa bos lokal selalu ada dalam koordinasi atau komando negara/pemerintah/aparatus negara yang beroperasi dalam bayang-bayang kepentingan melalui suatu kebijakan yang ada. Dengan adanya fenomena local bossism ini tentunya memberikan dampak yang dirasa merugikan bagi sebagian nelayan yang mengurus surat rekomendasi sendiri atau dalam arti lain dan meminta bantuan dari bos-bos lokal yang ada. Mereka merasa setiap kali ingin pergi ke laut harus menunggu beberapa hari dan tidak tau kapan hari pasti bisa ke laut karena tidak ada kepastian kapan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak solar akan keluar dari DKP, sehingga membuat sebagian nelayan turun ke laut tidak sesuai dengan perkiraan hari uang telah mereka tentukan. Selain terkait surat rekomendasi yang sering

lama keluarnya, sebagian nelayan juga mengeluhkan ada saat dimana kuota solar yang mereka dapatkan biasanya kurang dari permintaan mereka dengan alasan stok solar sudah sedikit jadi bagi-bagi dengan nelayan yang lain atau alasannya stok solar habis setiap tanggal 20 ke atas dan akan ada di tanggal awal bulan.

Fakta yang ditemukan di lapangan menjelaskan bahwa walaupun nelayan sudah berusaha untuk mempercepat keluarnya surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak solar, hal ini tidak memiliki pengaruh pada cepat tidaknya keluar surat rekomendasi yang mereka ajukan. Hal ini berbanding terbalik dengan surat rekomendasi perahu yang diurus oleh para bos-bos lokal. Adanya kolaborasi antara negara itu Aparatus negara dengan bos lokal yang di mana berusaha untuk mempertahankan relasinya (Ika Widia, 2018). Kolaborasi atau kerja sama tersebut dilakukan dengan cara *stationary bandit* dan *rowing bandit* yang berusaha untuk memanipulasi negara dengan kekuasaannya sehingga mendapatkan kekuatan yang mampu melakukan penetrasi di dalam masyarakat, mengatur relasi sosial yang ada, dan mengeksploitasi sumber daya.

Bos lokal memperkuat dan memanfaatkan negara untuk kepentingannya terutama mendapatkan keuntungan dan negara pun memanfaatkan situasi yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Sidel (1999) memberikan pandangan mengenai bagaimana bos lokal itu memperkuat, memanfaatkan dan menguasai yang menjadi ciri dari predatoris negara yang ada pada fenomena local bossism menjadi konsekuensi dalam menciptakan kuatnya jaringan para bos pada negara. Hadirnya local bossism dalam distribusi bahan bakar minyak solar di PPN Sungailiat menjadi suatu produk yang dihasilkan dari konspirasi dan kolusi aparatus negara dengan bos lokal, yang muncul dari adanya kekuasaan yang dimiliki aparatus negara dan “wibawa sosial” yang ada pada bos lokal di masyarakat yang dikendalikan itulah yang menyebabkan para bosses atau bossism muncul dan terus tumbuh sebagai kekuatan politik lokal.

3.2 Fenomena Local Bossism Dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak Solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Fenomena *Local Bossism*

No	Faktor	Keterangan
1.	Kuatnya Posisi Bos Lokal	Bos lokal memiliki kekuasaan dan kekuatan (<i>power</i>) untuk memonopoli keadaan.
2.	Perlindungan Dari Aparatus Negara dan Aparat Negara	Para aparatus negara (pegawai) yang mengurus pendistribusian menjadi pihak yang memperlancar kegiatan bos lokal serta aparat negara menjadi pihak yang melindungi bisnis para bos lokal
3.	Ketergantungan Masyarakat Terhadap bos lokal	Masih banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran bos lokal karena tidak mau ambil pusing dengan mengurus surat-surat permohonan bahan bakar minyak solar sebelum melaut. Kehadiran bos lokal dibutuhkan oleh para pencari solar seperti penambang timah dan calo-calo pembeli solar.

1. Kuatnya posisi bos lokal

Dengan adanya kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh bos lokal mereka mempunyai jaringan kekuatan yang membuat para bos lokal mampu dalam menguasai akses apa pun yang ada di pelabuhan. Bukan hanya akses yang berkaitan dengan jual beli perikanan, tetapi juga termasuk ke dalam akses distribusi bahan bakar minyak solar di PPN. Walaupun jumlah nelayan ada banyak sekali yang mengajukan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak solar membeli solar di PPN, bos lokal adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh paling besar dalam distribusi tersebut. Karena sudah banyak mengurus perahu para nelayan, jadi petugas yang mengurus surat rekomendasi dan petugas yang mengurus pendistribusian bahan bakar minyak solar pun sudah kenal dengan bos lokal, dan karena hal itu para petugas pun selalu mengutamakan mengurus keperluan dari para bos lokal itu terlebih dahulu.

Dalam pengurusan surat rekomendasi dan pembelian bahan bakar minyak solar yang bos lokal urusi secara langsung, maka mereka lebih cepat dilayani karena petugas cenderung takut dengan bos lokal. Apabila lama mengeluarkan surat rekomendasi dan lama mengurus pembelian bahan bakar minyak solar maka nanti akan memperburuk hubungan mereka dengan para bos lokal. Bos lokal sudah memiliki nama di PPN dan apabila petugas lama dalam proses pelayanannya maka nanti para bos lokal sudah malas bekerja sama dengan mereka, dan hal ini yang ditakutkan oleh para petugas. Yaitu memperburuk hubungan kerja sama antara bos lokal dan petugas pendistribusian bahan bakar minyak solar.

2. Relasi Dengan Aparatus Negara dan Aparat Negara

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam fenomena local bossism yang ada tentunya bekerja sama dengan para aparatus negara yang mengurus distribusi bahan bakar solar dan juga dilindungi aparat negara untuk menjalankan bisnisnya. Perlindungan dari aparatur negara yang dimaksud adalah pada saat bos lokal mengurus Surat Perizinan Berlayar yaitu surat perizinan berlayar di PPN. Kemudian setelah Surat Perizinan Berlayar keluar para bos lokal mengurus surat rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak solar di DKP. Sedangkan untuk perlindungan dari aparat negara atau negara tentunya sangat dibutuhkan oleh bos lokal dikarenakan mengingat bahwa aktivitas yang terjadi merupakan bisnis yang sensitif dalam negara dibutuhkan perlindungan dari para aparat negara untuk menjalankan bisnis tersebut.

3. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Bos Lokal

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran bos lokal memiliki peranan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa ketergantungan masyarakat terhadap bos lokal, pertama masyarakat yang tidak mau mengurus sendiri mulai dari SURAT PERIZINAN BERLAYAR, surat rekomendasi, dan pembelian solar di APMS/SPDN yang dalam artian hanya mau menerima beres asalkan solar yang mereka inginkan pasti akan menggunakan jasa bos lokal atau minta tolong bos lokal untuk mengurusinya, dengan memberikan uang sebagai imbalan atau upah telah mengurus keperluan pembelian solarnya.

Kedua, ketergantungan yang dimaksud adalah persediaan stok solar melimpah yang dimiliki bos lokal. Hal ini karena nelayan setiap minggu pergi ke laut dan jarang ada di daratan sehingga nelayan yang mengurus solar nya sendiri tentu tidak bisa mengambil jatah solar setiap minggu. Tentu saja hal ini menjadi peluang bos lokal yang tidak ke laut untuk mengambil jatah solar yang telah disediakan setiap minggunya, sehingga bos lokal memiliki jatah solar yang banyak dan berlimpah selain karena proses surat menyurat data dan pembelian yang dipercepat tetapi juga karena banyaknya stok solar yang mereka ambil setiap minggunya menjadikan bos lokal memiliki stok lebih di tempat mereka. Dengan banyaknya stok solar bos lokal akan menjual kembali dengan harga yang lumayan tinggi dibandingkan harga aslinya. Stok solar yang dimiliki oleh bos lokal dan hanya dijual ke nelayan yang membutuhkan tapi juga lebih sering dijual ke penambang timah dan para calo calo yang membutuhkan solar dan untuk harganya pun bisa disebut lumayan karena keuntungan hampir lebih dari setengah harga pembelian solar di APMS/SPDN.

3.3 Bos Lokal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat sebagai bagian dari Local Bossism dan Rent Seeking

Local bossism adalah cerminan dari kuatnya suatu negara (strong state) yang di mana negara dapat melakukan kontrol terhadap masyarakat dalam hal ini kita bisa melihat bahwa negara yang dalam hal ini dimaksud yaitu pihak PPN Sungailiat dan DKP memiliki peranan yang kuat dalam proses pendistribusian bahan bakar minyak solar. Kuatnya peranan negara dimanfaatkan oleh bos lokal dengan cara melakukan kerja sama bos lokal dan negara, bisa juga disebut bahwa bos lokal merupakan hasil perkawinan silang antara negara dan sistem pasar.

Bos lokal sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan serta mengatur sumber daya solar yang ada di PPN karena mereka memiliki power dan dekingan dari aparat negara. Dengan adanya hal ini menjadikan kebijakan pembelian bahan bakar minyak solar yang ada di PPN

sungailiat menjadi peluang untuk memperkaya diri serta menjaga jaringan bos-bos lokal tersebut dengan cara memberikan intensif kepada negara untuk menjaga hubungan dalam berjalannya bisnis mereka, dan di lindungi oleh aparaturnegara dalam menjalankan bisnisnya. semakin banyak bahan bakar minyak solar yang dijual maka semakin banyak pula keuntungan berbagai pihak. Bos lokal sendiri muncul dari sifat dasar negara yang menginginkan keuntungan serta memiliki kuasa atas kebijakan kemudian memanfaatkannya dan didukung dengan sifat masyarakat itu sendiri yang tidak mau repot mengurus pengajuan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak solar sehingga meminta bos lokal untuk mengurus surat rekomendasi, dan membuat posisi bos lokal merasa semakin dibutuhkan. hal ini menjadi peluang local bossism dalam distribusi bahan bakar minyak solar di PPN sungailiat semakin berkembang dimanfaatkan oleh bos lokal dan juga aparaturnegara.

Sidel memiliki tiga argumentasi dalam memahami local bossism (Adam, 2016). Pada argumentasi pertama orang kuat lokal atau bos lokal memperoleh kekuasaan dan kekayaan tidak berasal dari kepemilikan tanah ataupun kekayaan pribadi tetapi dari sumber-sumber negara. Berkenaan dengan hal tersebut bos lokal mendapatkan kekuasaannya dari negara yang menciptakan kebijakan tentang pembelian solar di PPN Sungailiat kemudian di monopoli dengan cara mempercepat proses pembelian bahan bakar minyak solar para bos lokal dan memberikan jatah bahan bakar minyak solar lebih. kontrol yang dimiliki oleh negara ini menjadi kunci penggabungan sumber daya manusia, alam, dan keuangan yang ada di PPN Sungailiat dengan cara mendiskriminasi penegakan hukum dan aturan, diskresi izin monopoli, pembuatan kontrak, perlindungan aparaturnegara, penggunaan berbeda lahan, dll (Adam, 2016).

Argumentasi kedua, hubungan antara orang kuat lokal atau bos lokal dan masyarakat luas di wilayah kekuasaannya bukan ditentukan oleh "sisi permintaan", tetapi hubungan ditentukan oleh "sisi persediaan" dalam bentuk struktur negara pada tingkat nasional dan ekonomi tingkat lokal (Adam, 2016). Berkenaan dengan hal ini ketergantungan yang ada pada bos lokal bukan melihat dari banyaknya permintaan bantuan pengajuan surat rekomendasi bahan bakar minyak solar dari masyarakat tetapi memang bos lokal bersedia membantu, dan apabila ada persediaan solar lebih yang dimiliki oleh bos lokal, akan dijual langsung ke nelayan yang membutuhkan solar tanpa harus membeli langsung ke SPDN/APMS di PPN Sungailiat.

Terakhir argumentasi yang ketiga, pengumpulan kekayaan pribadi dengan cara yang ilegal, kepentingan bos lokal menjadi tujuan utama sebagai sandaran hubungan antara bos lokal dan masyarakat luas. Berkenaan dengan hal ini, cara bos lokal dan negara termasuk cara yang ilegal dan memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Bos lokal tidak menjadi penghambat berkembangnya kapitalisme, tetapi sebagai pihak yang memfasilitasi dan mengambil keuntungan pada pertumbuhan industri dan perluasan pasar di wilayah teritorial kekuasaan mereka yaitu PPN Sungailiat.

Kemudian dalam fenomena rent seeking (pemburu rente) yang merupakan perbuatan suatu kelompok kepentingan yang berusaha untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara besar-besaran dengan usaha sekecil-kecilnya (Solihah, 2016), berkenaan dengan hal tersebut bisa dilihat dari fenomena *local bossism* dalam distribusi bahan bakar minyak solar di PPN Sungailiat yang telah terjadi bahwa hasil pembelian solar yang banyak dibeli bos lokal dari SPDN/APMS dengan harga sesuai dengan ketentuan negara, kemudian bos lokal jual dengan harga yang lumayan tinggi dari harga aslinya. Sehingga dengan modal atau usaha yang kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan adanya hal ini bos lokal memberikan pengaruh sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta dalam banyaknya pendapatan di atas normal. Bekerja sama dengan birokrat atau pemerintahan, pemodal, politisi, aparaturnegara dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan menggunakan kegiatan ilegal dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Dalam rent-seeking bos lokal berusaha untuk memonopoli sumber daya, terutama untuk mendapatkan sumber daya tersebut dengan cara "merayu atau melobi" pemerintah serta aparaturnegara untuk mendapatkan perlindungan serta mendapatkan akses ke distribusi bahan bakar minyak solar tersebut, dan tentunya setiap pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan. Rent-seeking dianggap sebagai perilaku negatif. Asumsi yang ditanamkan adalah setiap kelompok yang terlibat memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya melalui usaha yang sekecil-kecilnya. Posisi yang dimiliki oleh kelompok atau individu dalam fenomena *local bossism* digunakan untuk melobi, hasil lobi ini akan berdampak besar pada berjalannya suatu kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, adanya fenomena *local bossism* yang hadir dalam distribusi bahan bakar minyak solar di PPN Sungailiat menjadi suatu produk yang dihasilkan dari konspirasi adanya kolaborasi antara negara yaitu aparat negara dengan bos lokal yang berusaha untuk mempertahankan relasinya dengan cara *stationary bandit and rowing bandit*, mendapatkan kekuatan yang mampu melakukan penetrasi di dalam masyarakat, mengatur relasi sosial yang ada, dan mengeksploitasi sumber daya.

Melalui fakta tersebut, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang melatar belakangi munculnya fenomena tersebut yaitu pertama, kuatnya posisi bos lokal yang dalam hal ini bos lokal memiliki kekuasaan serta kekuatan untuk memonopoli keadaan. Kedua Perlindungan dari aparat negara dan aparat negara, yang dalam hal ini para aparat negara (pegawai) yang mengurus pendistribusian menjadi pihak yang memperlancar kegiatan bos lokal serta aparat negara yang menjadi pihak yang melindungi bisnis bos lokal. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan masyarakat terhadap bos lokal, yang dalam hal ini masih banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran bos lokal, karena masyarakat tidak mau ambil pusing dengan mengurus surat-surat permohonan distribusi bahan bakar minyak solar sebelum ke laut, serta kehadiran bisnis bos lokal sangat dibutuhkan oleh para pembeli solar ilegal serta penambang timah yang membutuhkan solar dalam pekerjaan mereka. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terjadinya penguasaan distribusi bahan bakar minyak solar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat yang dikuasai oleh bos lokal merupakan bagian dari *local bossism* dan *rent seeking* yang telah mengakar di kehidupan sosial masyarakat nelayan yang ada di sana.

REFERENCES

- Adam, Fuad Aenal. (2016). *Bos Lokal Di Kabupaten Muna: Studi Tentang Relasi Kuasa Antara Bos Lokal Dan Aktor – Aktor Lokal Dalam Pengelolaan Sektor Hutan Di Kabupaten Muna*. Universitas Gajah Mada
- Dahuri, R. (2000). *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*. LISPI-Ditjen. Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil, Dep. Kelautan dan Perikanan.
- Luhur, E. S., Sari, Y. D. (2012). Dampak Subsidi Solar Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Di Bitung Dan Pelabuhanratu. *J. Sosek KP* 7(2): 139-151.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/Permen-Kp/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan bakar minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap.
- Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 6 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
- Pujiyani, R. (2009). *Kondisi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Bandar Lampung*. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Reynoldus, Andrias Sahulata. (2021). *Sistem Pengelolaan Tata Niaga BAHAN BAKAR MINYAK solar Di Tingkat Pelabuhan Perikanan Nusantara*. Universitas Klabat: RA Sahulata: *Jurnal VOI (Voice Of Informatics)*.
- Satria, A. (2009). *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. IPB Press. Bogor. 178 hal
- Sidel, John T. (1999). *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*. Stanford : Stanford University Press.
- Solihah, R. (2016). *Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tyedmers, P. (2004). *Fisheriess and Energy Use. Encyclopedia of Energy*. Volume 2. Elsevier. Page 683 – 693
- Wati, Ika Widia. (2018). *Bos Lokal Dalam Dinamika Politik Lokal Di Indonesia (Studi Kasus Kekuasaan Politik Sutrisno Di Kabupaten Kediri)*. Skripsi Thesis,. Universitas Brawijaya.
- Wicaksono, Bagus. (2021). *Bosisme Lokal Dalam Tata Niaga Tembakau Di Kabupaten Temanggung: Disparitas Kekuasaan Aпти Dan Petani*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.